



## SUCCESS STORY

# Sulawesi district cuts red tape with OSS office

**South Sulawesi's Barru district distributes 1,800 free business permits to mark opening of new licensing office.**



The governor of South Sulawesi hands out business licenses to mark the opening of the new OSS Front Office in the district of Barru on Nov. 24, 2012.

*“The implementation of the small and medium enterprise survey and the preparation of standard procedures by Kinerja's BEE program should be implemented in other institutions in the district.”*

– Dr. Ir. Abustan, M.Si  
BAPPEDA Head, Barru

### Kinerja

BRI II Building 28<sup>th</sup> Floor, Suite 2807  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta, 10210  
Phone: +62 21 5702820  
Fax: +62 21 5702832  
www.kinerja.or.id

Business licensing is often cited as one of the most challenging hurdles facing the small and medium enterprises that make up the majority of Indonesia's economy.

A lack of procedural clarity and the need to acquire approval from a variety of separate government entities creates confusion, inefficiency and a temptation to use bribery to facilitate the processing of routine documents.

To remove these barriers and make registering a business and applying for operational licenses easier, the administration of Barru, South Sulawesi, launched a new one-stop shop (OSS) front office on Nov. 24, 2012.

The governor of South Sulawesi and the district head of Barru attended the event and symbolically handed over more than 1,800 licenses, free of charge, to local small business owners.

As part of its work to support a business-enabling environment, the USAID Kinerja project, through its local partner the Prosperous Justice Foundation (Yayasan Adil Sejahtera - YAS), is providing additional technical assistance to improve operating and management systems at the new regulatory clearinghouse.

This assistance was recognized by Barru District Head Ir. H. A. Idris Syukur, M.Si during his speech during district anniversary celebrations in February 2013, as he highlighted the impact of the support provided by YAS and Kinerja.

“The USAID Kinerja program has contributed to the improvement of public services and the investment climate in Barru, especially in the licensing sector, which in 2010 only issued about 590 permits with a total capital value of approximately IDR 42 billion. Compare this to what was achieved in 2012, when we were able to issue up to 4,900 various licenses, to firms with a combined capital value of IDR 471 billion,” he said.

Kinerja support elsewhere in the archipelago has helped accelerate the official processing times of several types of permits at the OSS in Tulungagung, East Java, and has helped the OSS in Simeulue, Aceh to more than double the number of permits it approved within 12 months.

By engaging stakeholders in the business community and local government, Kinerja works to promote a better business environment and encourage sustainable engagement of the private sector in the decisions that directly impact their livelihoods.

This engagement is made possible in part by Kinerja's support for data-based decision making through surveys such as the Local Economic Governance Survey (LEGS), which was developed by its partner organization Indonesia Regional Autonomy Watch (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah – KPPOD) to identify businesses' perception of local government performance in nine aspects of economic governance.

The survey provided information for Kinerja and participating district administrations to prioritize areas of local economic governance reform. In addition, because the index encourages inter-district comparison, the survey also creates incentives for enhanced competition and performance.

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS





## KISAH SUKSES

### Kabupaten di Sulawesi memotong jalur birokrasi dengan kantor OSS

**Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan mendistribusikan 1.800 izin usaha secara gratis untuk menandai pembukaan kantor pelayanan perizinan yang baru.**



Gubernur Sulawesi Selatan menyerahkan izin usaha yang menandai pembukaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (OSS) yang baru di kabupaten Barru pada tanggal 24 November 2012.

**“Survei terhadap usaha kecil dan menengah serta penyusunan prosedur standar oleh program BEE Kinerja perlu dilakukan oleh instansi-instansi lain di kabupaten.”**

**-Dr. Ir. Abustan, M.Si  
Kepala BAPPEDA Barru**

#### Kinerja

Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta, 10210  
Telepon: +62 21 5702820  
Fax: +62 21 5702832  
www.kinerja.or.id

Perizinan usaha sering disebut sebagai salah satu rintangan terberat yang dihadapi usaha kecil dan menengah yang merupakan bagian terbesar dari perekonomian Indonesia.

Prosedur yang tidak jelas dan keharusan untuk mendapatkan persetujuan dari berbagai lembaga pemerintah menimbulkan kerancuan, inefisiensi dan godaan melakukan suap untuk mempermudah pengurusan surat-surat secara rutin.

Untuk menghapuskan rintangan ini dan mempermudah pendaftaran usaha dan permohonan izin operasional maka Pemerintah Barru, Sulawesi Selatan, membuka kantor pelayanan perizinan terpadu (OSS) yang baru pada tanggal 24 November 2012.

Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Barru menghadiri acara pembukaan ini dan secara simbolis menyerahkan lebih dari 1.800 izin secara cuma-cuma kepada pemilik usaha kecil setempat.

Sebagai bagian dari pekerjaan untuk mendukung iklim usaha yang baik, proyek Kinerja USAID, melalui mitra lokalnya Yayasan Adil Sejahtera (YAS), memberikan bantuan teknis tambahan untuk meningkatkan sistem operasional dan manajemen di lembaga regulasi yang baru ini.

Bantuan ini disebutkan oleh Bupati Barru Ir. H. A. Idris Syukur M.Si dalam kotbahnya pada acara perayaan hari jadi kabupaten pada bulan Februari 2013 ketika ia menyoroti dampak dari dukungan yang diberikan oleh YAS dan Kinerja.

“Program Kinerja USAID telah memberikan kontribusi untuk perbaikan pelayanan publik dan iklim investasi di Barru, khususnya di sektor perizinan, yang pada tahun 2010 hanya menerbitkan sekitar 590 izin dengan total modal sekitar Rp 42 miliar. Bandingkan angka ini dengan yang telah dicapai pada tahun 2012, ketika kami dapat menerbitkan hingga 4.900 izin usaha untuk perusahaan-perusahaan dengan nilai modal gabungan yang mencapai 471 miliar,” katanya.

Dukungan Kinerja di wilayah lain di nusantara telah membantu mempercepat waktu pengurusan resmi beberapa jenis perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (OSS) di Tulungagung, Jawa Timur, dan telah membantu OSS di Simeulue, Aceh yang menerbitkan hingga lebih dari dua kali jumlah izin yang disetujui dalam 12 bulan terakhir.

Dengan melibatkan pemangku kepentingan dari dunia usaha dan pemerintah daerah, Kinerja berupaya mempromosikan iklim usaha yang lebih baik dan mendorong keterlibatan sektor swasta yang berkelanjutan dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap mata pencaharian mereka.

Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan antara lain berkat adanya dukungan Kinerja dalam pengambilan keputusan berbasis data melalui survei-survei seperti Survei Tata Kelola Ekonomi Daerah (LEGS), yang dikembangkan oleh organisasi mitra Kinerja, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) untuk mengetahui persepsi dunia usaha tentang kinerja pemerintah daerah di sembilan aspek tata kelola ekonomi.

Survei ini memberikan informasi kepada Kinerja dan pemerintah kabupaten peserta program untuk memprioritaskan bidang-bidang reformasi tata kelola ekonomi daerah. Selain itu, karena indeks tata kelola ekonomi mendorong perbandingan antar kabupaten, maka survei ini juga menjadi pendorong untuk meningkatkan persaingan dan kinerja.